

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jakarta merupakan kota yang di dalamnya banyak berdiri gedung-gedung bertingkat dan kawasan perumahan elit serta beragam fasilitas elit lainnya. Di balik itu, terdapat satu sisi gelap Jakarta yang tidak terjamah dan kurang mengundang perhatian baik para pemangku kebijakan atau mayoritas penduduk di suatu Jakarta. Tanpa disadari dengan semakin bertambahnya bangunan-bangunan elit seperti gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan berimplikasi pada semakin terpinggirkan dan terancamnya hidup masyarakat miskin kota. Rumah-rumah bahkan beberapa sekaligus tempat bekerja mereka dirubuhkan dan diratakan dengan tanah demi kepentingan rakyat kelas atas. Ini merupakan sebuah kegiatan yang dinamakan dengan penggusuran.

Kata penggusuran dan penggusuran paksa memiliki arti yang berbeda. Komentar Umum CESCR (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) Pasal 4 Nomor 7 Tahun 1997 mendefinisikan penggusuran paksa sebagai “pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen atau sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan melanggar hak-haknya sebagai manusia”, sedangkan penggusuran ialah “tindakan pengosongan lahan warga untuk kepentingan pembangunan, baik yang dilakukan secara paksa ataupun tidak” (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2018). Kondisi yang timpang diperlihatkan oleh Jakarta dengan slogan “Jakarta Kota Kolaborasi”-nya itu masih belum sepenuhnya bertindak “kolaboratif” dalam praktiknya. Penggusuran paksa Kampung Bukit Duri menurut Puspitosari dan Rahayu (2018) pada tahun 2015 merupakan salah satu contoh dari distribusi pembagian ruang yang melalaikan prinsip keadilan.

Penggusuran lahan ini bukanlah hal baru di Jakarta. Kasus penggusuran lahan di DKI Jakarta terbilang cukup masif. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat total sejak tahun 2015 sampai 2017 terdapat 416 kasus penggusuran paksa (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2018). Sasaran penggusuran lahan di kota ialah masyarakat kelas bawah atau *wong cilik* yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses atas ruang kota yang semakin dikomersialisasikan. Di saat mereka membutuhkan ruang hidup yang layak – termasuk di dalamnya ialah hak atas tanah – justru mereka dipaksa untuk keluar dari pemukiman atau rumahnya, ditambah kompensasi yang layak atas pemindahan secara paksa tersebut terbilang jarang sehingga mereka masyarakat miskin dan termarginalkan menjadi tambah miskin karena baru saja kehilangan rumah sebagai tempat berteduh mereka dari derasnya persaingan atas ruang di kota besar.

Rumah memiliki maknanya sendiri bagi tiap penghuninya, ada dari mereka yang memaknai rumah layaknya manusia yang harus dijaga dan dihormati serta ada dari mereka yang kontras menganggap rumah sebagai properti investasi (Herwati *et al.*, 2018). Privatisasi ruang – yang kian dikomersialisasikan – dan kurangnya dukungan sosial pada masyarakat miskin semakin meningkatkan daerah kumuh kota (Manggar, 2011). Tentunya data-data seperti ini perlu menjadi masukan ke pemerintah, sederhananya sebuah aspirasi meski perlu bertahap mengikuti alur birokrasi. Ini semakin memarginalkan dan memfragmentasi *wong cilik* melalui pendekatan ruang sehingga persoalan mereka saat ini adalah sulitnya memperoleh akses terhadap ruang di kota-kota seperti Jakarta.

Kasus penggusuran lahan di Indonesia sudah lama terjadi, banyak diantaranya dilaksanakan atas kepentingan elit. Seperti contohnya di zaman Jakarta di pimpin oleh Ali Sadikin. Pawda F. Tjoa dalam buku *Ideas of the City in Asian Settings* (2019) ini mengkaji materialisasi fisik ideologi dari seorang Ali Sadikin (Gubernur Jakarta di zaman Orde Baru) yang mengungkap politik di balik perencanaan ruang kota Jakarta yang kemudian mempengaruhi tata ruang kota Jakarta saat ini. Di dalam tulisannya itu ia membahas penggusuran lahan yang terjadi atas dasar pengembangan mega proyek. Proyek itu dinamakan Mercuri Suar

yang memberikan efek pada masyarakat kecil atau *wong cilik* tergusur karena lahan mereka akan dipakai untuk pembangunan jalan besar dan kawasan elit. Pembangunan berskala besar terjadi di kawasan Thamrin dan Sudirman untuk dibangun jalan, Mall Sarinah, Hotel Indonesia, namun kawasan Kebun Kacang dikesampingkan begitu saja dikarenakan kondisi tanah yang bekas rawa-rawa dan terletak di dataran rendah membuat Kebun Kacang tidak cocok untuk dibangun. Tetapi kemudian justru Kebun Kacang dipadati oleh mereka yang terdampak penggusuran.

Pada tahun 2004 Jakarta melakukan inovasi mobilisasi transportasi publik dengan meluncurkan Busway yang berjalan di atas jalan bebas hambatan, namun hal ini menyisakan peristiwa penggusuran lahan para pedagang *asongan* dan pedagang kaki lima yang kemudian dipindahkan ke pasar tradisional tanpa kompensasi. Hal yang cukup menarik ialah bagaimana kelas menengah-atas di Jakarta memanfaatkan logika “bebas hambatan” untuk menguatkan dukungan penggusuran atas para pedagang tadi sebagai alasan dari sulitnya berjalan di trotoar sehingga menurut Abidin Koesno pemanfaatan atas logika “bebas hambatan” menunjukkan pembenaran atas penggunaan kekerasan dan tindakan otoriter (Kusno, 2010) terhadap *wong cilik*. Dengan perkembangan Jakarta yang diiringi oleh penggusuran *wong cilik*, maka tidaklah sulit untuk membayangkan Jakarta seperti apa nantinya (Kusno, 2012).

Penggusuran paksa yang terjadi belum lama ini ialah penggusuran paksa di Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan. Penggusuran paksa Gang Buntu II Pancoran ini sudah dimulai sejak awal Januari tahun 2021. Penggusuran Paksa di wilayah Pancoran ini melibatkan korporasi besar yakni Pertamina Training and Consulting (PTC) dengan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan warga miskin kota yang tinggal di wilayah Gang Buntu II Pancoran. Tindakan pembongkaran ini dinilai ilegal dan merupakan penggusuran paksa. Nelson Nikodemus Simora, Pengacara Publik LBH Jakarta menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan ormas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat karena telah melanggar Komentar Umum CESCR

(Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) Pasal 11 Nomor 7 Tahun 1997 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak dan telah melakukan penggusuran dengan kekerasan sehingga sangat bertolak belakang dengan resolusi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993 (Briantika, 2021).

Negara sejatinya memiliki kewajiban dalam menyediakan warganya kehidupan yang layak, seperti di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1); UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat (1); Pasal 19 ayat (1); Pasal 129; UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 40; dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya Pasal 11 ayat (1) – membahas hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sekedar memiliki hak atas rumah, di sisi lain negara memiliki porsi besar dalam mewujudkan ini. Penggusuran paksa ini kemudian memunculkan pertanyaan yang menarik, sebenarnya apakah kita memiliki hak atas kota? Sebuah hak kolektif menurut Harvey dalam Herwati *et al* (2018) yang di atas hak individu dan yang menentukan perubahan dalam diri kita melalui interaksi kita dengan kota.

Apa yang terjadi antara PTC dengan warga Gang Buntu II ini merupakan sebuah kontestasi atau perebutan kekuasaan atas suatu ruang, Gang Buntu II Pancoran. Di satu sisi Pertamina melalui PTC memiliki kepentingan untuk pemulihan aset mereka di Gang Buntu II Pancoran, namun di sisi lain warga juga memiliki kepentingan karena mereka hidup dan beraktivitas di Gang Buntu II Pancoran dalam waktu yang sudah lama (sejak 1980-an). Benturan juga terjadi dalam dimensi legal, di satu sisi betul Pertamina selaku pemegang hak atas lahan 2,8 Hektar, namun di sisi lain perlibatan kekerasan dan penggusuran juga melanggar hukum. di Warga Gang Buntu II tidaklah sendirian dalam menghadapi korporasi besar tersebut, mereka didampingi oleh kelompok-kelompok solidaritas yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam latar belakang. Kelompok-kelompok solidaritas ini telah melakukan beragam upaya formal untuk mempertahankan ruang termasuk menggandeng LBH dan pemerhati isu sosial seperti KontraS untuk bersama memperjuangkan hak atas ruang hidup yang layak

bagi warga Gang Buntu II. Puspitosari dan Rahayu (2018) menyatakan bahwa kota merupakan ruang yang berisi bermacam-macam kepentingan politik yang memiliki relasi dengan agenda perebutan atas ruang dan kepemilikan alat-alat produksi. Ruang menurut Lefebvre (1991) tidak dapat dilihat melalui kacamata keruangan atau spasial saja, melainkan perlu memperhatikan aspek sosial yang melingkupinya.

Lefebvre menuangkan argumentasinya terkait konsep ‘ruang sosial’ dalam bukunya yang berjudul “*The Production of Space*” pada tahun 1991. Setelah itu perbincangan mengenai konsep keruangan sering dibahas dalam kaitan spasial dan sosialnya. Kajian mengenai fenomena keruangan mengandung kontestasi di dalamnya seperti yang telah diungkapkan oleh Aji dan Kausan pada tahun 2020. Kontestasi atau perebutan dalam penguasaan ruang digambarkan oleh Aji dan Kausan dalam penelitian mereka mengenai eksistensi Komunitas Satoe Atap di Semarang yang mana di tengah kencangnya modernisasi dan pembangunan kota mereka berusaha untuk memberdayakan anak jalanan yang kerap dipandang negatif dan terpinggirkan (Aji dan Kausan, 2020).

Kondisi ketimpangan spasial dan sosial yang diungkap Aji dan Kausan (2020) dinilai tidak hanya terlihat sebatas mata memandang saja, namun data pun berbicara mengenai meningkatnya pertumbuhan anak jalanan di Semarang yang pertumbuhannya diperburuk oleh tajamnya masalah ekonomi di kota. Komunitas Satoe Atap hadir untuk menyediakan pendidikan alternatif bagi anak jalanan (Aji dan Kausan, 2020). Penelitian mereka ini mengaitkan kelompok anak jalanan miskin kota, komunitas dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang mana upaya penyediaan pendidikan alternatif untuk anak jalanan dilakukan oleh Komunitas Satoe Atap. Gambaran kontestasi dalam penelitian ini diungkap melalui bagaimana kota terus dibangun sesuai dengan apa yang telah dibayangkan oleh pemerintah atau ahli seperti arsitek, sedangkan kelompok anak jalanan terus bertahan di tengah kehidupan jalanan yang keras dan pembangunan kota.

Dalam menyikapi banyaknya anak jalanan di Semarang, pemerintah memberlakukan razia, walaupun di samping hal tersebut terdapat beberapa lembaga seperti Komunitas Satoe Atap yang peduli terhadap eksistensi anak jalanan. Kegiatan komunitas tersebut diawali dengan kegiatan seperti membaca, menulis, bermain dan menari, serta mendongeng. Dalam perkembangannya, Komunitas Satoe Atap mulai melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah dengan tujuan anak jalanan dapat mengenyam pendidikan di sana walau belum membayar biaya untuk sekolah (Aji dan Kausan, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Kausan menggunakan konsep-konsep pada teori produksi ruang sosial oleh Lefebvre seperti *spacial space*, *representation of space*, dan *representational space* yang menurut Lefebvre sendiri konsep tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan (Lefebvre, 1991).

Singkatnya penelitian Aji dan Kausan ini berfokus pada pengembangan komunitas sebagai fasilitator bagi masyarakat yang termarginalkan. Namun di sini Aji dan Kausan belum dapat mengungkap potret *wong cilik* sebagai entitas kehidupan yang memiliki kesulitan dalam memperoleh akses terhadap ruang kota. Begitupun dengan tulisan milik Tjoa dan Abidin Kusno, pembahasan mereka mengenai penggusuran lahan yang terjadi di Jakarta memberikan kita sebuah bayangan tentang apa yang terjadi ketika kita menjadi masyarakat kelas bawah atau *wong cilik* di Jakarta, kita menjadi tahu bahwa marginalisasi di Jakarta merupakan efek materialisasi politik, kesulitan dalam memperoleh akses terhadap ruang di kota menjadi masalah *wong cilik*.

Penelitian-penelitian di atas memunculkan pandangan bahwa *wong cilik* menjadi kelompok pasif dari perkembangan kota. David Graeber dalam bukunya *Bullshit Jobs: A Theory* (2015) memberikan penjelasan yang tersirat bahwa *wong cilik* sebenarnya memiliki posisi yang *meaningful* atau bermanfaat bagi perkembangan kota. Di saat banyak orang yang menerima gaji besar tanpa sebenarnya memberikan manfaat untuk khalayak umum, mereka yang terpinggirkan seperti tukang bersih-bersih jalanan atau supir misalnya, menerima perlakuan buruk dan gaji yang kecil. David Harvey (Harvey, 2012) juga

menjelaskan situasi ini, bahwa sebagaimana mereka (*wong cilik*) memiliki kontribusi atas kehidupan kota melalui cara mereka sendiri dalam bertahan hidup. Kemudian dalam konteks ruang gang buntu II yang didominasi PTC bagaimana *wong cilik* aktif dalam memproduksi ruang sosialnya. Penekanan-penekanan dalam tema seperti akses terhadap ruang kota, gerakan perlawanan *wong cilik*, dan *value* atas tanah diperlukan dalam studi selanjutnya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aji dan Kausan, Tjoa, dan Abidin Kusno di atas ini melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan topik yang sama, yakni *Urban Space* atau ruang kota yang selalu dikontestasikan baik antar individu, kelompok, dan antar institusi dengan lokasi penelitian di Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan. Menggunakan konsep triadik produksi ruang sosial milik Henri Lefebvre, peneliti mendeskripsikan dan menyajikan potret bagaimana *wong cilik* dalam hal ini para kelompok solidaritas dan warga Buntu II Pancoran mempertahankan ruang mereka baik spasial dan sosial sebagai respon atas perlakuan represifitas dan marginalitas otoritas. Penelitian ini memotret perlawanan atas okupasi ruang oleh negara yang memarginalkan *wong cilik*, mereka yang ‘tidak mempunyai’. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran singkat di atas dapat kita perhatikan bahwa mereka yang termarginalkan atau *wong cilik* ini mengalami kesulitan dalam mengakses ruang kota karena kota semakin diprivatisasi dan dikomersilkan. Hal ini merupakan buntut dari materialisasi politik pembangunan karena memiliki dampak berkepanjangan bagi tatanan ruang kota, begitupun dengan kontestasi ruang kota yang didominasi oleh tindakan otoritas dan kekerasan masyarakat menengah-atas sehingga *wong cilik* kerap kali menjadi sasaran pengggusuran lahan. *Wong cilik* menjadi kelompok pasif perkembangan ruang kota, padahal di satu sisi mereka sama-sama berkontribusi atas kota. Karena keterbatasan akses terhadap ruang kota, *wong cilik* selama ini masih dianggap tidak memiliki kapasitas dalam memproduksi ruangnya. Kemudian dalam konteks ruang gang buntu II yang

didominasi PTC bagaimana wong cilik aktif dalam memproduksi ruang sosialnya. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa *wong cilik* memiliki kapasitas dalam memproduksi ruangnya meskipun mereka teralienasi, terpinggirkan, dan menghadapi tantangan penggusuran lahan seperti yang terjadi di Buntu II Pancoran melalui potret mereka dalam melakukan aktivisme lahan. Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadikan Gang Buntu II Pancoran dikontestasi?
2. Bagaimana kontestasi lahan yang terjadi di Gang Buntu II Pancoran?
3. Bagaimana warga Gang Buntu II Pancoran bersama dengan kelompok solidaritas memperjuangkan lahan Gang Buntu II Pancoran?
4. Bagaimana warga Gang Buntu II Pancoran memproduksi ruang di tengah usaha dominasi ruang oleh Pertamina Training and Consulting?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian etnografis ini adalah untuk mendeskripsikan aktivisme lahan di Buntu II Pancoran sebagai bentuk produksi ruang sosial *wong cilik*. Aktivisme lahan dari *wong cilik* kemudian ditujukan untuk mendapatkan potret perjuangan *wong cilik* dari penggusuran lahan. Selain itu tujuan rinci dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh warga Gang Buntu II Pancoran dan kelompok solidaritas dalam mempertahankan kekuasaan atas ruang, baik secara spasial maupun sosial.
- 2) Menangkap potret budaya *wong cilik* melalui kontestasi ruang yang terjadi di Gang Buntu II Pancoran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini tentunya dapat memberikan manfaat pada perkembangan keilmuan secara teoritis dalam bidang ilmu antropologi, khususnya kajian-kajian pada masyarakat miskin kota atau persoalan masyarakat “urban” dan seluk-beluk potret kehidupan masyarakat miskin kota. Selain itu penelitian ini memberikan

manfaat berupa pengimplementasian nyata pada konsep teori yang digunakan, yakni teori produksi ruang sosial oleh Henri Lefebvre di disiplin antropologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas melalui penelitian ini ialah tersedianya informasi mengenai implementasi konsep keruangan pada kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dapat melihat suatu permasalahan melalui kacamata teoritis dan memberikan efek pada sikap masyarakat atas pengusuran yang terjadi di beberapa daerah. Selain itu penelitian ini memiliki manfaat sebagai pemantik diskusi atas persoalan yang terjadi di Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan sehingga informasi tersebut dapat menjadi masukan bagi para aktivis dan warga Gang Buntu II untuk membenahi atau menyusun strategi dalam mempertahankan hak mereka atas kepemilikan ruang.

1.5 Kerangka Teori (Produksi Ruang Sosial dan Terminologi *Wong Cilik*)

1.5.1 Proliferasi ruang sebagai titik kejenuhan Lefebvre

Singkat mengenai Henri Lefebvre, ia adalah seorang Marxist dan Ekstensialis filsuf yang lahir pada tahun 1901 di selatan Perancis dan meninggal pada tahun 1991 di kediamannya di kota Navarrenx. Kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Perancis menjadikan dirinya sebagai salah satu filsuf yang karyanya paling sering dibicarakan pada rentang tahun 1950 – 1960-an. Karyanya “*Dialectical Materialism*” pada tahun 1967 membawanya pada sebutan Bapak Dialektika dalam waktu kurang lebih 2 generasi lamanya. Semasa hidupnya, Lefebvre menyaksikan perubahan dan modernisasi yang terjadi di Perancis pada masyarakat melalui kehidupan sehari – hari mereka. Inilah yang menjadi lokus penelitian dari karya – karyanya Lefebvre, di mana kehidupan sehari – hari masyarakat menjadi bahasan yang cukup penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Berkaitan dengan lokus penelitiannya itu, Lefebvre menghasilkan sebuah karya yang cukup fenomenal yaitu “*The Production of Space*” pada tahun 1974 (Peoplepill.com, 2020).

Pada awalnya Lefebvre mengkritik para Marxian bahwa mereka telah mengabaikan suatu ruang dan waktu dalam dunia komoditas, kritiknya tersebut dijelaskan kembali bahwa aktivitas produksi kapitalisme menghasilkan ruang dalam bentuk materialitas (Gottdiener, 1993). Dalam pandangannya, ruang diproduksi layaknya sebuah produksi barang dan jasa (Molotoch, 1993). Lefebvre berpendapat bahwa di dunia ini segala hal perlu melalui proses produksi (Lefebvre, 1991), *“There is nothing, in history and society, which does not have to be achieved and produced”*. Namun berbeda dengan alam, bahwa alam tidak memproduksi namun menciptakan sumber-sumber yang digunakan oleh manusia untuk memproduksi *“Nature creates and does not produce; it provides resources for a creative and productive activity on the part of social humanity; but it supplies only use value, and every use value- that is to say, any product inasmuch as it is not exchangeable- either returns to nature or serves as a natural good.”* (Lefebvre, 1991) dan alam hanya memberi nilai guna, bila tidak dapat dijadikan alat tukar maka kembali menjadi produk alami. Kemudian Lefebvre memberikan sebuah analogi terkait hubungan alam dalam menciptakan sumber daya bahwa pohon, buah, dan bunga tidaklah sebuah produk meskipun ia di taman karena mereka mekar karena mekar saja, tidak ada alasan kenapa mereka mekar. Sebaliknya, kemanusiaan lah yang ia sebut suatu praktik sosial melakukan kegiatan produksi. Menurut Lefebvre ruang juga memiliki keterkaitannya dengan globalisasi seperti yang dicantumkan oleh Molotoch dalam kalimatnya, *“According to Lefebvre, globalization creates a worldwide confrontation of diverse values, ideas, and preferred arrangements; they all undergo "trial by space." The stakes are high: groups, classes, or fractions of classes "can not constitute themselves, or recognize one another, as 'subjects' unless they generate ... a space”* (Molotoch, 1993) globalisasi menciptakan konfrontasi atas nilai dan ide serta resiko yang cukup tinggi seperti disintegrasi kelompok membuat mereka tidak bisa menjadi ‘subjek’ akan dihadapi apabila mereka tidak membentuk suatu ‘ruang’.

Lefebvre memulai percakapan mengenai teorinya dengan mengungkapkan bahwa 'ruang' erat kaitannya dengan makna geometri dimana ruang merupakan konsep dari disiplin ilmu matematika, oleh karenanya ketika dikatakan sebuah 'ruang sosial' maka akan terdengar aneh (karena melawan konstruksi yang ada). Perdebatan mengenai 'ruang' secara filosofis kemudian menandakan bahwa ruang itu sendiri mulai memiliki bidang keilmuannya. Para ahli matematika ini menjadikan ruang sebagai basis domain disiplin mereka namun terlihat paradox dan tidak jelas hubungannya secara fisik dan sosial sehingga perdebatan tersebut diserahkan kepada filsuf. Apa yang telah dihasilkan oleh para ahli matematika kemudian dimunculkan gagasan bahwa ruang memiliki status sebagai 'benda mental' atau 'ruang mental' sehingga ini memicu ketertarikan para ahli bahasa dan menyebabkan proliferasi atau pembiakan dari set-set (praktis, historis, ataupun logika) (Lefebvre, 1991:1-3).

Sebagai contoh, di sini Lefebvre mengkritik Foucault yang mana bahwa beliau belum dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan ruang dan hubungannya antara teoritis dan praktis, mental dan sosial, antara ruang para filsuf dan ruang bagi mereka yang berurusan dengan hal-hal material (Lefebvre, 1991:4). Dengan kata lain, para filsuf lainnya pun belum dapat menyelesaikan itu akibat proliferasi yang terus-terusan terjadi. Perdebatan-perdebatan yang terus terjadi kemudian mengakibatkan ruang mental menjadi lokus praktik teoritis yang mana terpisah dari praktik sosial sehingga memunculkan sebuah jurang yang sangat jelas antara ruang mental yang di sisi lainnya terdapat ruang fisik dan sosial. Pemikiran epistemologis-filosofis dirasa telah gagal dalam memunculkan keilmuan yang sudah sejak lama ada, namun tak kunjung muncul, yakni ilmu tentang ruang (*a science of space*). Ilmu ini bahkan belum sampai pada status analitik, teoritis, atau perpecahan dan *cross-section* ruang (meskipun metode *cross-section* ini dianggap memperburuk keadaan) (Lefebvre, 1991:7). Mengapa demikian? karena semua dibicarakan dengan terminologi 'ruang'. Contohnya penyakit dan kegilaan dikatakan memiliki 'ruang'nya sendiri oleh beberapa spesialis dan karenanya banyak ruang-ruang yang kita hadapi.

Ruang menurut Lefebvre perlu dipandang tidak hanya dari sisi spasialnya saja, melainkan juga sisi sosialnya karena ruang sosial perlu diperhatikan dan ruang sosial itu muncul akibat tindakan sosial (Pamungkas, 2016) dan tindakan sosial tersebut digabungkan dengan tindakan subjek secara individu dan kolektif (Az Zahra, 2018), selain itu ruang menurut Lefebvre selalu diproduksi dan direproduksi melalui pemakaian atas ruang oleh manusia. Oleh karena itu, pendapat Lefebvre terhadap apa ruang sosial itu bukanlah suatu hal alamiah yang secara tiba-tiba tercipta, jauh dari kata “cipta” itu sendiri, “*(social) space is a (social) product*” (Lefebvre, 1991) ruang sosial adalah produk sosial, “*(Social) space is not a thing among other things, nor a product among other products: rather subsumes things produced, and encompasses their interrelationships in their coexistence and simultaneity - their (relative) order and/or (relative) disorder*” (Lefebvre, 1991) ia bukanlah suatu benda dengan benda lainnya dan bukan juga suatu produk di antara produk lainnya melainkan menggolongkan barang produksi yang mencakup keterkaitannya dalam koeksistensi dan simultanitas.

Dalam hal produksi ruang, maka bidang yang perlu diperhatikan menurut Lefebvre ialah bidang fisik atau alam dan juga kosmos; kedua, bidang mental, termasuk abstraksi logika dan abstraksi formal; ketiga, bidang sosial. Pembagian-pembagian ruang seperti perumahan, tempat tinggal (habitat manusia) adalah persoalan arsitektur. Sedangkan kota kecil, kota besar merupakan *bailiwick* (daya tarik) dari disiplin urbanisme dan yang lebih luasnya lagi ruang teritorial, regional, nasional, dan seterusnya ialah tanggung jawab dari para ekonom dan dimanfaatkan oleh para oportunis seperti politisi. Lefebvre disini tidak mengarah pada pembentukan diskursus pada ruang (seperti yang dilakukan oleh beberapa filosof dan ahli terdahulu), namun disini Lefebvre ingin mengekspos produksi ruang yang sebenarnya dengan menyatukan berbagai jenis ruang dan modalitas asal usulnya dalam teori.

Lefebvre bertujuan untuk meledakan keadaan dimana pembicaraan ruang masih menjadi diskursus yang kurang tajam dan terpisah-pisah. Lefebvre ingin

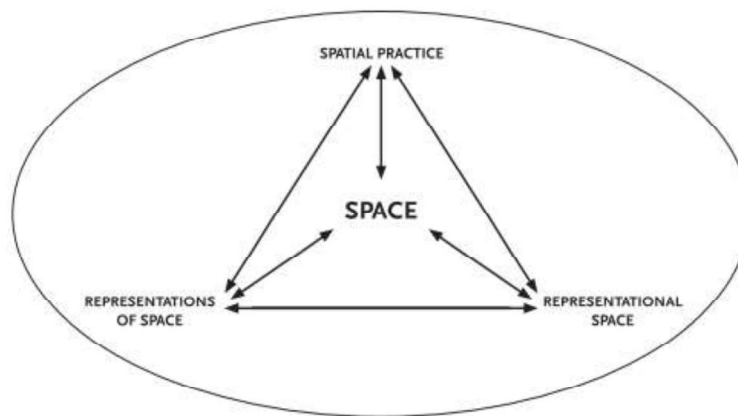
mendorong konfrontasi ide-ide dan proposisi yang memperlakukan ruang sebagai gagasan yang terisolasi (*as 'thoughts' to be put under the microscope*) melainkan sebagai prefigurasi (refleksi masyarakat masa depan) di ambang modernitas (Lefebvre, 1991:24). Dalam arti yang dibutuhkan Lefebvre bukanlah pengganti tendensi dominan (atas pembentukan polemik diskursus tadi), melainkan pembalikan tendensi itu. Ruang yang diproduksi berfungsi menjadi alat pikiran dan alat tindakan, dimana ruang menjadi alat produksi dan juga sebagai alat kontrol, karenanya ada dominasi dan kekuasaan sehingga seluruh masyarakat sebenarnya terus tunduk pada praktik politik, yakni kekuasaan negara (Lefebvre, 1991:8). Lantas apa yang membentuk kapitalisme disebutkan oleh Lefebvre merupakan kumpulan dari keragaman modal, kapitalis, komoditas, tenaga kerja, modal, tanah yang saling tumpang tindih (Lefebvre, 1991:10). Namun sebagian darinya lolos dari mereka yang ingin memanfaatkannya, karenanya kekuatan sosial dan politik negara gagal menguasai ruang sepenuhnya (Lefebvre, 1991:24).

1.5.2 Ruang sosial, *a conceptual triad*, dan ruang yang terdominasi

Menurut Lefebvre (1991:30) ruang sosial adalah produk sosial, tentunya efek dari pernyataan tersebut tidak lah menguap begitu saja. Proposisi 'ruang sosial adalah produk sosial' ialah ruang alam menghilang. Kita menginginkan alam untuk terus terjaga asri selamanya, namun di sisi lain kita justru mengkhianatinya dengan merusak dan mengeksploitasinya. Karena persengkongkolan tersebut sekarang alam dilihat sebagai bahan mentah yang darinya kekuatan-kekuatan produktif dari berbagai sistem sosial membentuk ruang-ruang khusus (Lefebvre, 1991:31), sehingga memang benar alam itu *resistant*, dan tidak terbatas kedalamannya, tapi sekarang menurut Lefebvre alam sudah dikalahkan dan tinggal menunggu kekosongan dan kehancurannya.

Setiap masyarakat dan karenanya setiap mode produksi serta subvariannya memproduksi ruang, ruangnya sendiri (Lefebvre, 1991:31). Ruang sosial berisi dan memberikan tempat untuk reproduksi; (1) hubungan sosial (hubungan bio-fisiologis antara jenis kelamin dan antar kelompok umur, serta organisasi khusus keluarga; (2) hubungan-hubungan produksi yang mana termasuk pembagian divisi

kerja dan pengorganisasiannya dalam bentuk hierarkis. Hubungan antara produksi dan reproduksi tidak dapat dipisahkan, keduanya dalam tingkat reproduksi biologis dan produksi sosial-ekonomi membentuk reproduksi sosial. Ruang sosial di sini memiliki interaksi ganda atau tiga kali lipat antara hubungan sosial produksi dan reproduksi (reproduksi biologis, reproduksi *labour power*, dan reproduksi hubungan sosial produksi) dimana representasi simbol dan alam memiliki peran dalam mempertahankannya selagi pula menggusurnya. Ruang mengandung representasi dari relasi-relasi produksi yang tergolong sebagai relasi kuasa dimana ruang memuatnya dalam bentuk bangunan, monumen, dan karya seni (Lefebvre, 1991:31-32).



Gambar 1. 1 Conceptual Triad Production of Space

Sumber: Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre

Lefebvre kemudian memunculkan apa yang dia sebut sebagai *a conceptual triad*, dimana di dalamnya terdapat *spatial practice*, *representations of space*, dan *representational space*.

“space is at once result and cause, product and producer.” This added dimension means that space itself is not a neutral container but plays a role in shaping the social processes that determine representations of space, spatial practice, and representational space. While this appears at first glance to be a circular argument, it is actually an acknowledgment that the production of space is a continual process, and that space is always changing as conceptions,

perceptions, and lived experiences change.” (Goonewardena *et al.*, 2008:270)

“ruang adalah sekaligus hasil dan sebab, produk dan produsen.” Dimensi tambahan ini berarti bahwa ruang itu sendiri bukanlah wadah netral tetapi berperan dalam membentuk proses sosial yang menentukan representasi ruang, praktik spasial, dan ruang representasional. Walaupun ini sekilas tampak sebagai argumen melingkar, sebenarnya ini adalah pengakuan bahwa produksi ruang adalah proses yang berkelanjutan, dan bahwa ruang selalu berubah seiring dengan perubahan konsepsi, persepsi, dan pengalaman hidup.” (Goonewardena *et al.*, 2008:270)

Jika ruang adalah sebuah produk, maka pengetahuan kita tentang ruang diharapkan untuk mereproduksi dan menjelaskan prosesnya, ‘objek’ yang terkait diharapkan bergeser dari *things in space* (benda-benda di ruang) menuju *production of space* (produksi ruang) yang sebenarnya (Lefebvre, 1991:36-37). Mengenai pengetahuan yang diharapkan untuk direproduksi, penjelasannya ialah seperti teori yang mereproduksi dengan proses generatif (penggabungan konsep yang lebih kuat dalam arti tidak hanya deskriptif dan bahkan secara global) terus bergerak maju-mundur, bolak-balik antara masa lalu dan masa sekarang. Untuk memahami produksi ruang sosial maka diperlukan konsep triadik yakni praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasi.

Praktik spasial (*spatial practice*) suatu masyarakat mensekresikan ruang masyarakat itu, dalam arti bahwa praktik spasial suatu masyarakat akan terungkap melalui penguraian ruangnya. Di bawah neokapitalisme, praktik spasial mewujudkan hubungan yang erat, dalam ruang yang dirasakan (*perceived*), antara realitas sehari-hari (rutinitas sehari-hari) dan realitas perkotaan (rute dan jaringan yang menghubungkan langkah-langkah yang disisihkan untuk bekerja, 'pribadi' dan rekreasi) (Lefebvre, 1991:38). **Representasi ruang (*representations of space*)** adalah ruang yang dikonseptualisasikan, ruang ilmuwan, perencana, urbanis, subdivisi teknokratis dan insinyur sosial, sebagai jenis seniman tertentu dengan kecenderungan ilmiah - semuanya mengidentifikasi apa yang dijalani (*lived*) dan apa yang dirasakan (*perceived*) dengan apa yang dikandung (*conceived*) (Lefebvre, 1991:38). Konsep ruang cenderung ke arah sistem tanda

verbal (dan karena itu dikerjakan secara intelektual). Sedangkan **ruang representasional** (*representational spaces*) adalah ruang yang secara langsung hidup melalui gambar dan simbol yang terkait, ruang yang didominasi sehingga dialami secara pasif, ruang yang ingin diubah dan disesuaikan oleh imajinasi (Lefebvre, 1991:39). Ruang representasional cenderung ke arah sistem simbol dan tanda non-verbal yang dihidupi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sejarah, Lefebvre mengarahkan bahwa kita harus mempelajari tidak hanya sejarah ruang, tetapi juga sejarah representasi, bersama dengan hubungannya dengan satu sama lain, dengan praktik, dan dengan ideologi. Sejarah harus memperhitungkan tidak hanya asal-usul ruang-ruang ini, tetapi juga, dan terutama, interkoneksi, distorsi, perpindahan, interaksi timbal balik, dan hubungan mereka dengan praktik spasial masyarakat atau mode produksi tertentu yang sedang dipertimbangkan. Dampak praktis dari *representations of space* (representasi ruang) ialah berupa intervensi dan modifikasi pada tekstur spasial. Intervensi dari representasi ruang terjadi melalui konstruksi yang dengan kata lain, melalui arsitektur, dipahami bukan sebagai bangunan dari struktur tertentu, istana atau monumen, melainkan sebagai proyek yang tertanam dalam konteks spasial dan tekstur yang menyerukan 'representasi' yang tidak akan lenyap ke alam simbolik atau imajiner. Sebaliknya, satu-satunya produk *representational space* (ruang representasional) adalah karya simbolik.

Seperti halnya dualitas kepentingan antara pedagang kaki lima dengan penertib trotoar, di sebuah taman yang berlokasi di Bali banyak berjejeran pedagang kaki lima sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas saat jam-jam sibuk. Kemudian pemerintah Kota Denpasar melakukan penertiban kepada para pedagang kaki lima sehingga terjadilah kejar-kejaran antar keduanya. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa taman memiliki representasi yang berbeda antar dua kelompok tadi, ada yang melihat taman sebagai tempat mencari nafkah dan di sisi lainnya ada yang melihat taman sebagai tempat penuh kekuasaan (Yamuna, Punia and Mahadewi, 2019). Namun pada intinya pemahaman fungsi taman antara yang sudah dibayangkan dengan praktiknya berbeda, ini di mana ruang abstrak dan

representations of space bertemu. Terkadang, *representations of space* mengkombinasikan ideologi dan pengetahuan dalam sebuah praktik sosial-spasial, perspektif klasik sangat cocok dengan ini, namun berbeda kasus lagi dengan ruang para perencana saat ini dimana sistem lokalisasinya menempatkan aktivitas pada tempat yang berbeda-beda. Dari contoh tersebut dapat kita tarik kesimpulan sederhana, yakni *spatial practice, representations of space and representational spaces* memiliki kontribusi yang berbeda-beda pada produksi ruang, sesuai dengan kualitas dan kuantitas mereka, dengan masyarakat dan *mode of production* (mode produksi) yang bersangkutan, dan sesuai dengan periode sejarah, hubungan ketiga rangkaian momen dari *perceived* (dipersepsikan), *conceived* (dibayangkan) dan *lived* (dihidupi) tidak pernah stabil dan sederhana.

Kekuatan produksi, (yakni berupa alam, kerja beserta organisasi mereka, teknologi dan pengetahuan) dan hubungan produksi bermain peran dalam produksi ruang dan dalam hal ini berkaitan dengan mode produksi (Lefebvre, 1991:46). Dengan memeriksa kembali transisi antara *mode of production* kemudian akan mengungkap sebuah ruang yang masih segar, ruang yang dihasilkan selama perubahan tersebut (pergeseran mode produksi), sebuah ruang yang direncanakan dan diatur kemudian (Lefebvre, 1991:46-47). Ketika perusahaan-perusahaan *start up* atau perusahaan berbasis teknologi siber dan digital semakin menunjukkan pesonanya, banyak dari sarjana-sarjana yang ikut mengantri lowongan di perusahaan-perusahaan tersebut. Menjadi pegawai di perusahaan *start up* menjadikan mereka sebagai ‘anak muda yang pintar dan kaya’ atau singkatnya ‘keren’. Pekerjaan seperti PNS kini jarang diminati, pemerintah merespon hal ini dengan merencanakan Bandung sebagai ‘San Fransicco’-nya Indonesia. Bilamana betul dan serius wacana tersebut sepertinya pemerintah harus melihat seperti apa San Fransicco sekarang, kota termahal, sulit mendapatkan kerja, bahkan salah satu warga sana menyikapi *being homeless* sebagai *full-time job* (Lien, 2022). Di balik kasus San Fransicco yang mengungkapkan dirinya sebagai kota yang tidak *livable* ini menunjukkan status kode spasial menjadi jelas, bahwa ia bukanlah sebuah sarana untuk membaca atau menginterpretasi ruang,

melainkan hidup di dalam ruang tersebut, memahaminya, dan memproduksi. Kode spasial menyatukan tanda-tanda verbal seperti; kata/kalimat, makna yang tertanam; dan tanda-tanda non-verbal seperti musik, suara, dan konstruksi arsitektur.

Lefebvre memunculkan banyak terminologi mengenai jenis-jenis ruang yang salah satunya ialah *dominated space* (**ruang yang terdominasi**). Ruang yang terdominasi menurut Lefebvre (1991:165) merupakan ruang yang tertutup, steril, dan dikosongkan. Satu hal yang ditekankan oleh Lefebvre ini ialah bagaimana ruang yang terdominasi diperoleh dari hubungannya dengan negara dan kekuatan politik (Lefebvre, 1991:166). Ruang yang terdominasi ini menurut Lefebvre ialah sebuah ruang yang secara spasial (matematika) dan sosialnya (mental atau sensorik) didominasi oleh sang pemegang kekuasaan. Namun, yang terdominasi tidak hilang begitu saja karena tidak ada ruang yang hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak (Lefebvre, 1991:165). Kita dapat lihat melalui Jakarta misalnya, di mana kota dengan penuh sejarah dan simboliknya ini diletakkan monumen-monumen yang sarat akan interpretasi terhadap identitas bangsa dan nasionalisme oleh rezim kekuasaan pada saat itu. Soekarno yang kental akan pembangunan infrastruktur penunjang olahraga menyiratkan sebuah pesan bahwa olahraga adalah salah satu tombak politik bagi Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan, sekaligus menunjukan Jakarta sebagai ibu kota yang menjadi pusat dari kekuatan pascakolonial Indonesia (Kusno, 2000:61). Ideologinya mengenai kekuatan negara-negara dunia ke-tiga sungguh kental dengan acara-acara olahraga seperti Asian Games Ke-4 (Lutan, 2005) dan GANEFO (Lutan and Hong, 2005).

Bagi Lefebvre, meski ruang telah didominasi oleh aktor atau pihak tertentu, yang ‘terdominasi’ tidak lah hilang begitu saja melainkan terus berdinamika (Lefebvre, 1991:166). Misalnya di bilangan Sudirman dan sekitar Gelora Bung Karno sudah lama banyak ditemukan *Starling* atau Starbucks Keliling yakni sebuah penjual asongan yang menjajalkan kopi seduh dan makanan ringan yang biasa di jual di warung-warung pinggir jalan. Fenomena itu kemudian berlanjut dengan adanya sekarang kumpulan anak-anak remaja yang suka berkumpul untuk

sekedar nongkrong di area pintu keluar Stasiun MRT Dukuh Atas dengan pakaian “*full outfit*” yang sering diinterpretasikan sebagai keseharian “orang kecil” di wilayah elit dan privat meskipun peruntukan ruang di sana ialah *urban space*. Melanjutkan diskusi di atas, David Harvey dalam bukunya yang berjudul *Rebel cities: From the Right to the City to the Urban Revolution* (2012) mengungkapkan bahwasanya mereka yang termarginalkan sejatinya memiliki kemampuan untuk memproduksi ruang. Kelompok yang termarginalkan ini membentuk koalisi untuk mencari definisi lain dari publik yang tidak hanya terbatas dari akses terhadap ruang publik saja sehingga dapat diberdayakan untuk menciptakan ruang bersama yang disosialisasi dan dipergunakan untuk aksi politik.

Hak atas kota ialah hak kolektif di atas hak individu untuk menjadikan kota sesuai dengan keinginan hati mereka. Perkembangan dan pertumbuhan kota menurut Harvey merupakan hasil dari rampasan hak massa atas kota. Harvey memunculkan konsep *the commons* di mana praktik dari *commoning* intinya terletak pada prinsip kolektifitas dan non-komodifikasi terhadap suatu sebagai milik bersama sehingga ini membentuk sebuah dunia sosial kota di mana yang umum dapat ditempati. Karenanya dalam penelitian ini peneliti membutuhkan satu terminologi untuk membantu peneliti menerjemahkan temuan-temuan di Buntu II melalui cara pandang Lefebvre. Terminologi itu ialah *wong cilik* (orang kecil), di mana alasan utama mengapa terminologi itu peneliti ambil karena mayoritas “orang kecil” ini adalah mereka yang sedang bersinggungan dengan Pertamina di lahan Buntu II. Ini menarik untuk diperdalam lagi mengenai bagaimana mereka para “*wong cilik*” ini tidak “kalah telak” seperti yang Lefebvre katakan mengenai dominasi ruang.

1.5.3 Terminologi *Wong Cilik*

Koentjaraningrat dalam bukunya berjudul “Tjelapar: Sebuah Desa di Djawa Tengah Bagian Selatan” pada tahun 1970 memotret masyarakat Jawa menjadi dua kelompok yakni “*wong cilik*” dan “*priyayi*” (Soejatno and Anderson, 1974). Kurang lebih satu dekade kemudian John Sullivan menggunakan terminologi yang sama ketika ia mengkaji peran pemerintah dalam komunitas urban di

Yogyakarta, yaitu “*wong cilik*” dan “*wong gede*” untuk mendeskripsikan perbedaan kelas di sana (Sullivan, 1986). Dua terminologi *wong cilik* yang dibawa oleh kedua tokoh ini akan saya gunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu teori dasar dalam membedakan kelompok-kelompok yang menghidupi Buntu II.

Wong cilik dalam penjabarannya Koentjaraningrat merupakan masyarakat kelas bawah, yakni masyarakat kampung kota dan petani pedesaan. *Bendara* atau *priyayi* kemudian digambarkan sebagai masyarakat kelas atas seperti bangsawan dan kalangan berpendidikan atau para petani, buruh, pengerajin, dan lain-lain.. Singkatnya lagi *wong cilik* adalah “*wong sing ora duwe*” (yang tidak punya) sedangkan bangsawan ialah mereka yang mempunyai atau “*wong sing duwe*” (Robson, 1987). Kedua kelas sosial ini memiliki ketimpangan yang besar, dapat kita lihat melalui bentuk-bentuk kebudayaan seperti budaya kerajaan dan budaya populer yang dimiliki oleh *wong cilik* sehingga dualisme budaya kerap terjadi (Soejatno and Anderson, 1974).

Wong cilik dan *wong gede* versi John Sullivan meski sama penamaan namun memiliki dimensi praktik yang berbeda. *Wong cilik* mengartikan kampung sebagai sebuah komunitas, kampung yang memiliki arti administratif diartikan dan dimaknai berbeda dari biasanya dengan budaya tradisional seperti gotong-royong yang merepresentasikan tradisi pengorganisasian masyarakat di zaman feodal sebagai sebuah *way of life* (Sullivan, 1986). Secara spasial pun kampung ialah tempat *wong cilik* tinggal. Sebuah pembeda dari *wong gede* yang secara spasial memiliki perbedaan dari sisi kepadatan populasi dan rumah serta aksesibilitas jalan yang ada di dalam atau di sekitarnya (Newberry, 2008).

Terminologi “kampung” pun memiliki dimensinya sendiri dari pengertian administratifnya sebagai sebuah teritori yang di dalamnya terdapat kantor-kantor administrasi daerah. “Kampung” bagi masyarakat Malaysia merupakan sebuah kamp atau sebuah desa, sedangkan di Indonesia ia merupakan sebuah komunitas (Sullivan, 1986), namun sebagai pembeda kelas juga kampung milik *wong cilik*

ini tidak lah sama dengan rumah-rumah toko pinggir jalan milik kelompok pedagang Tiongkok (Newberry, 2018) karena kampung milik *wong cilik* maupun rumah toko para pedagang Tiongkok berasosiasi dengan aktivitas mereka (Sullivan, 1986).

1.6 Metode Penelitian

Dalam meneliti fenomena keruangan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi, pandangan luas, pandangan teoritis yang memungkinkan, mempelajari permasalahan penelitian yang mempertanyakan makna yang dianggap individu-individu atau kelompok-kelompok berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2007:37). Penelitian kualitatif biasanya membahas secara interpretatif mengenai konteks-konteks seperti politik, sosial dan budaya melalui peneliti, partisipan, dan pembaca serta penelitian dilakukan ketika terdapat masalah yang perlu dieksplorasi yang dalam hal ini adalah mendengarkan *silent voices* atau ketika kita membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sebuah isu (Creswell, 2007:37-38).

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi di sini tidaklah berupa definisi tradisionalnya yang mendeskripsikan tempat, keadaan sosial dari catatan-catatan perjalanan namun sudah bergeser kepada keterbukaan produksi ideologi budaya (Creswell, 2007:4). Dalam etnografi, menurut Spradley bahwa deskripsi yang dikemukakan etnografi adalah sebuah terjemahan yang mengandung istilah-istilah serta makna yang *native* serta istilah dari sang etnografer sendiri (Salama dan Siddiq, 2019). Untuk itu diperlukan pendekatan pada apa yang akan diteliti seperti dengan tinggal di lokasi yang akan diteliti atau sering mengunjunginya namun tetap menjaga jarak dengan yang diteliti (Walcott dalam Creswell, 2007:18) Spradley juga menjelaskan bahwa sasaran utama etnografi ialah untuk memahami *way of life* melalui pandangan *native* sehingga etnografi berarti belajar dari masyarakat (Spradley and Curdy, 2012).

Dalam etnografi peneliti tidak hanya melakukan kegiatan seperti menulis dan menyalin catatan serta mewawancarai narasumber saja, melainkan pula memahami budaya manusia (Spradley, 1997). Dua jenis etnografi yang populer dikalangan peneliti ialah *realist* etnografi dan etnografi kritis yang mana dalam penelitian ini saya lebih menekankan etnografi kritis dengan perspektif advokasi yang membahas tema-tema seperti kekuasaan, prestis, dominasi, merjinalitas, dan lain-lain (Creswell, 2007:70). Bagi Gibbons, Hammersley, dan Atkinson penelitian etnografi biasanya melalui beberapa langkah seperti (1) melakukan studi di lapangan dengan keadaan natural dan bukan sebuah eksperimen; (2) mengumpulkan data dari berbagai sumber, namun biasanya observasi partisipan dan wawancara mendalam paling sering digunakan; (3) koleksi data yang “tidak terstruktur” karena biasanya tidak selalu mengikuti *research design* (desain penelitian) awal dan interpretasi digunakan dalam analisis datanya; (4) karena studinya mendalam maka fokusnya hanya pada beberapa kasus atau kelompok skala kecil; (5) analisis data menyertakan interpretasi dari makna, fungsi, konsekuensi dari tindakan manusia dan institusi, dan penarikan benang merah kepada konteks yang dekat atau luasnya (Gibbons, Hammersley and Atkinson, 1986).

Karena studi dalam penelitian ini mengangkat tema-tema seperti dominasi, keterbatasan akses terhadap ruang, aktivisme lahan yang memerlukan data-data mendalam dan studi literatur yang beragam maka penelitian ini memerlukan metode kualitatif dalam pengerjaannya. Selain itu, penelitian ini memerlukan pemahaman detail yang kompleks terhadap isu yang diangkat sehingga memerlukan kegiatan seperti berbicara langsung dengan partisipan, menemui mereka di rumah atau tempat kerja, dan membiarkan mereka untuk bercerita tanpa adanya intervensi dari apa yang kita harapkan dan dari yang kita telah baca. Penelitian ini juga membangun diskursus mengenai pemberdayaan yang membantu mereka untuk menyebarluaskan cerita tentang mereka yang terpinggirkan (Creswell, 2007:38). Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini peneliti rasa cocok untuk dapat mendeskripsikan aktivisme lahan di Buntu II

Pancoran dan menangkap potret perjuangan mereka dalam memperoleh akses atas ruang kota.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Secara administratif penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pancoran, Jl. Pancoran Buntu II, Kota Jakarta Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena dalam waktu kurang lebih dua bulan belakang ini (sejak Februari 2021) warga Gang Buntu II sedang bertahan dari penggusuran yang dilakukan oleh pihak PTC. Di saat-saat yang seperti itu, beberapa kelompok solidaritas terus mendampingi warga dan menjalankan beberapa kegiatan aktivitas bersama untuk membantu warga Gang Buntu II tetap memperoleh hak atas lahannya. Ini menarik karena secara hukum sebenarnya warga Buntu II tidak memiliki hak atas lahan di Buntu II, sesuai dengan putusan pengadilan, namun di sisi lain pun Pertamina sebagai pihak tuan tanah tidak diperbolehkan untuk menggusur lahan dengan cara kekerasan dan melibatkan Ormas, meskipun pada akhirnya Pertamina disinyalir melibatkan Ormas dalam upaya mereka untuk mengembalikan aset mereka di Buntu II Pancoran.

Selain itu lokasi ini peneliti pilih karena lokasi yang sangat strategi, dekat dengan pusat Jakarta, bahkan dekat sekali dengan patung ikonik di Jakarta yakni Tugu Pancoran, dan juga lokasi ini dikepung oleh tingginya gedung-gedung korporasi besar sehingga sangat menggambarkan ketimpangan sosial yang terjadi. Ini menarik kemudian dengan identitas buntu II Pancoran yang terkesan kumuh atau *slum* namun diperebutkan oleh negara yang dimanifestasikan melalui Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.6.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau *data collecting* dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan atau metode etnografi ialah melalui beberapa instrumen seperti wawancara mendalam, observasi partisipasi, data-data pustaka, dan lain-lain. Meski tidak ada cara pakem dalam melaksanakan penelitian kualitatif, namun beberapa langkah seperti (1) menentukan pendekatan; (2) *mapping* secara sosial

dan spasial lokasi yang diteliti; (3) menentukan tema-tema keilmuan yang berkaitan dengan komunitas yang diteliti; (4) menentukan jenis etnografi yang diterapkan; (5) mengumpulkan data-data di lapangan; (6) membuat potret budaya holistik yang menggabungkan pandangan emik dan etik (Creswell, 2007:72).

“In an ethnographic study, the investigator collects descriptions of behavior through observations, interviewing, documents, and artifacts (Hammersley & Atkinson, 1995; Spradley, 1980), although observing and interviewing appear to be the most popular forms of ethnographic data collection.” (Creswell, 2007:131)

“Dalam studi etnografi, peneliti mengumpulkan deskripsi perilaku melalui observasi, wawancara, dokumen, dan artefak (Hammersley & Atkinson, 1995; Spradley, 1980), meskipun mengamati dan mewawancarai tampaknya merupakan bentuk pengumpulan data etnografi yang paling populer.” (Creswell, 2007:131)

Dalam studi etnografi, peneliti mengumpulkan deskripsi sebuah perilaku melalui instrumen-instrumen seperti observasi, wawancara, dokumen-dokumen, dan artefak-artefak. Namun menurut Creswell instrumen yang paling populer ialah wawancara dan observasi. Wawancara mendalam atau dapat disebut juga dengan *in-depth interview* digunakan sebagai alat peneliti untuk memperoleh data primer yakni data yang diberikan langsung oleh informan nantinya berupa lisan yang kemudian akan dicatat oleh peneliti menjadi transkrip wawancara. Selain itu peneliti juga akan melakukan observasi dan beberapa kegiatan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh atau data sekunder dan untuk mempermudah penelitian, maka peneliti akan menggunakan metode studi pustaka.

1.6.2.1 Observasi Partisipasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi sebagai salah satu alat dalam mengumpulkan data pada penelitian etnografis. Secara umum, observasi partisipan adalah sebuah metode dimana peneliti ikut ke dalam keseharian, ritual, interaksi, dan beberapa acara pada kelompok atau komunitas tertentu dengan tujuan mempelajari secara eksplisit dan implisit kehidupan kelompok atau komunitas tersebut dalam lingkup budaya (DeWalt and DeWalt,

2011:2). Dalam pandangannya Tim Ingold observasi partisipasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan dengan melaksanakan kegiatan yang sama dengan kegiatan obyek yang diteliti sehingga peneliti merasakan dan berusaha menjadi yang diteliti, atau singkatnya observasi partisipasi adalah sebuah cara untuk mengetahui dari dalam (Ingold, 2013:5), peneliti selain mengamati juga menjadi peserta dalam latar budayanya (Jorgensen dalam Creswell, 2007:243).

“The ethnographer gathers information in many ways, but the primary approach is to observe the culture-sharing group and become a participant in the cultural setting “
(Jorgensen dalam Creswell, (2007:243))

“Etnografer mengumpulkan informasi dalam banyak cara, tetapi pendekatan utamanya adalah mengamati kelompok yang berbagi budaya dan menjadi peserta dalam latar budaya.” (Jorgensen dalam Creswell, (2007:243))

Selain itu observasi ini bertujuan untuk melihat pola keseharian masyarakat yang diteliti, dengan memperhatikan keseharian masyarakat maka pola akan terbentuk dan hal tersebut dapat membantu peneliti dalam melihat suatu permasalahan serta solusi dalam lingkup penelitiannya. Singkatnya dalam etnografi, observasi partisipasi merupakan sebuah pendekatan untuk mendalami pengalaman-pengalaman di lapangan dan memperoleh pemahaman akan kehidupan sosial yang fundamental (DeWalt and DeWalt, 2011).

Peneliti melakukan observasi (pengamatan) setiap berkunjung ke Gang Buntu II Pancoran. Untuk observasi partisipasi, peneliti terjun langsung ke dalam beberapa kegiatan dan acara yang diselenggarakan selama tahun 2021 dan 2022. Peneliti secara acak berkunjung ke Gang Buntu II Pancoran dengan tujuan selain wawancara dengan informan, selain itu peneliti menyempatkan untuk tinggal di Gang Buntu II Pancoran selama kurang lebih satu setengah bulan. Peneliti juga menyempatkan melakukan observasi dengan mengelilingi kawasan Gang Buntu II Pancoran untuk sekedar bertegur-sapa dengan masyarakat sekitar. Beberapa kali peneliti menjumpai kejadian yang tidak terduga dan kemudian menuntun peneliti untuk memperhatikan kejadian tersebut.

Contoh kecilnya ialah ketika awalnya peneliti tidak mengetahui bahwasanya terdapat pertikaian antar kelompok solidaritas di Gang Buntu II. Tentunya ini sangat membantu peneliti untuk membagi kelompok solidaritas dan memetakan kawasan mereka. Masing-masing kelompok solidaritas seperti memiliki teritorinya sendiri. Melakukan observasi di Gang Buntu II Pancoran bagi peneliti merupakan sebuah hal yang menyenangkan. Dengan mengitari kawasan Gang Buntu II Pancoran peneliti dapat melihat bagaimana tanah yang ditimbun-timbun dengan puing dan sampah dahulunya ialah sebuah rawa. Tiap motor atau mobil ada yang lewat maka tanah akan bergoyang. Bahkan di suatu acara musik-musikan dentuman bass, petikan gitar listrik, ritme drum dan seraknya suara vokalis band punk berhasil menggetarkan kawasan dengan tanah yang tidak padat itu.

Peneliti beberapa kali beraktivitas langsung dalam beberapa acara yang pernah diselenggarakan di Gang Buntu II Pancoran seperti Buka Bersama Buntu II Pancoran, Kerjabakti memabat tumbuhan liar demi mengurangi populasi nyamuk di sana, Pancoran Ceria, dan beberapa agenda diskusi mereka. Selama melakukan observasi partisipasi peneliti beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Adaptasi ini peneliti lakukan dengan cara seperti berkunjung ke Gang Buntu II Pancoran dalam waktu yang cukup lama, mempelajari dialek dan bahasa lokal di Gang Buntu II, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, konteks bahasa sehari-hari digunakan pada saat wawancara, bermain atau sekedar berkunjung tanpa tujuan wawancara, merekam kejadian dan wawancara. Hal-hal sebelumnya adalah beberapa pokok kunci dalam melakukan observasi partisipan menurut DeWalt dan DeWalt (2011).

Observasi di lapangan ini membantu peneliti untuk membuka ruang-ruang yang berada di balik bayang-bayang konflik di Gang Buntu II Pancoran. Dengan observasi di lapangan, khususnya observasi partisipasi peneliti dapat memahami kehidupan sosial mereka yang terancam dan sudah mengalami penggusuran. Meski demikian peneliti tetap menjaga pandangan peneliti mengenai apa yang telah peneliti alami selama di sana. Dalam artian peneliti menjaga posisi sebagai

peneliti untuk tidak bias dan memberikan penilaian semata. Hasil dari observasi berupa pengalaman dan catatan lapangan peneliti gunakan kemudian untuk melengkapi data-data wawancara dan data-data analisis saat melengkapi penulisan laporan penelitian. Hasil-hasil tersebut juga peneliti gunakan untuk memeriksa kembali keabsahan data dari wawancara dengan informan.

Selama melakukan observasi, peneliti berjumpa dengan orang-orang yang kemudian peneliti jadikan informan dan melakukan wawancara. Banyak juga orang-orang yang peneliti temui hanya sekedar berinteraksi dengan normal tanpa membahas apa yang sebenarnya peneliti cari. Dari obrolan-obrolan singkat mengenai kehidupan mereka, kesulitan mereka selama ini, atau sekedar membicarakan sesama tetangga (gosip), peneliti mendapatkan gambaran yang cukup banyak mengenai kehidupan sosial di Gang Buntu II Pancoran. Observasi dilakukan dari rentang bulan April tahun 2021 hingga April 2022 dengan waktu satu setengah bulan menetap di Gang Buntu II Pancoran. Setelah menetap, peneliti melanjutkan observasi dan wawancara dengan berkunjung langsung ke Gang Buntu II Pancoran dengan mengendarai motor dari rumah peneliti ke lokasi penelitian. Biasanya peneliti berkunjung ke Gang Buntu II Pancoran sedari pagi hingga sore. Untuk pemilihan hari biasanya peneliti menyesuaikan dengan ketersediaan dari *gatekeeper* atau orang yang dapat membantu peneliti di sana. Kadang kala peneliti suka berkunjung dadakan meski tidak ada orang yang biasa membantu peneliti berkeliling di sana, hal ini peneliti lakukan setelah mengenal cukup dekat dengan para warga di sana.

Beberapa kali peneliti berkunjung di malam hari, kegiatan di pagi, siang, dan malam hari tentunya berbeda. Inilah yang peneliti butuhkan untuk lebih masuk ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kesulitan yang kerap kali peneliti jumpai ialah situasi yang tidak kondusif baik saat wawancara berlangsung atau saat observasi keliling Gang Buntu II Pancoran. Biasanya dalam situasi seperti ini peneliti memanfaatkan kesulitan tersebut dengan membuka kembali obrolan baru yang kemudian perlahan peneliti arahkan kembali ke arah pertanyaan yang sudah peneliti rancang. Adapula permasalahan seperti tidak memungkinkannya peneliti

untuk berkunjung ke Gang Buntu II dikarenakan sedang rawan intel dari kepolisian. Saat itu banyak terjadi kasus penangkapan warga Gang Buntu II Pancoran karena keterkaitan mereka dengan penggunaan narkoba. Peneliti disarankan untuk tidak berkunjung dahulu sementara waktu ke Gang Buntu II Pancoran, ditambah adanya kasus pelecehan seksual terhadap 14 anak kecil di Buntu II yang melibatkan seorang pedagang asongan (bukan warga Gang Buntu II Pancoran). Ini memberikan efek trauma yang besar bagi para korban yang sebagian besar ialah anak perempuan. Salah satu korban sempat peneliti amati, tadinya ia merupakan seorang anak yang riang dan ceria, namun semenjak kasus itu anak ini menjadi lebih pendiam dan cukup tertutup. Usaha melalui jalan legal sudah diupayakan, namun hal ini terhambat karena kurangnya bukti dan tertutupnya para korban ketika wawancara berlangsung. Selagi menunggu situasi kondusif peneliti melakukan pencarian data-data melalui artikel-artikel ilmiah dan mencari data-data kronologis terkait konflik di Buntu II dengan Pertamina. Komunikasi antar peneliti dengan informan tetap peneliti jaga untuk mengetahui *update* informasi yang terjadi di Gang Buntu II Pancoran.

1.6.2.2 Studi Pustaka

Selanjutnya untuk memenuhi data sekunder seperti bahan rujukan, peneliti menggunakan studi pustaka yang menurut Nazir (2003) dalam (Awalina dan Purwoko, 2018) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan mengenai masalah yang akan di bahas. Dalam penelitian ini, studi pustaka akan digunakan peneliti untuk memperoleh data kualitatif yang bersumber dari buku, jurnal, internet, skripsi, dan lain-lain. Data-data mengenai sejarah Jakarta, konflik pertanahan di Gang Buntu II Pancoran, keterlibatan Ormas, dan data-data saintifik peneliti peroleh melalui pencarian-pencarian di internet dan perpustakaan.

1.6.2.3 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan salah satu jenis instrumen penelitian kualitatif. Yang membedakan wawancara mendalam dengan jenis wawancara lainnya adalah pedoman yang disusun oleh peneliti nanti dengan maksud

memperoleh data sejelas-jelasnya juga mendalam kemudian peneliti saat melakukan wawancara mengembangkan pertanyaan mereka sehingga data yang diperoleh lebih mendalam namun bentuknya relatif tidak terstruktur (Ingold, 2013:4). Wawancara mendalam atau *in-depth interview* ini akan didampingi dengan metode triangulasi. Triangulasi dikenal dalam dunia antropologi sebagai alat untuk memeriksa validitas data.

Triangulasi adalah sebuah strategi yang berisikan beberapa metode atau teknik menyaring fenomena yang sama (DeWalt and DeWalt, 2011:136), karena teknik dalam memperoleh data beragam maka diperlukan pemeriksaan silang untuk melihat keabsahannya (DeWalt and DeWalt, 2011:128) sehingga data tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan suatu tema atau perspektif (Creswell, 2007:208). Triangulasi memiliki berbagai macam jenis seperti triangulasi sumber data, metode, teori, waktu, dan peneliti (Bachri, 2010). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan memeriksa kembali data-data keterangan dari informan dan dibandingkan dengan sumber lain sehingga didapatkan kesepahaman dari sebuah data. Dalam penelitian ini peneliti memeriksa ulang data-data wawancara dan dibandingkan dengan data-data observasi di lapangan. Peneliti juga menggunakan metode triangulasi waktu yang bertujuan untuk melihat perilaku kehidupan di Gang Buntu II dari pagi hingga malam hari.

Wawancara dilakukan pada 3 informan kunci secara intens. Namun pada saat wawancara berlangsung kerap kali beberapa orang tiba-tiba ikut ke dalam pembicaraan, dalam hal ini peneliti tidak memasukan beberapa orang tersebut ke dalam daftar informan karena beberapa dari mereka tidak setuju untuk diwawancarai. Seperti pada saat peneliti mewawancarai Vebrina. Vebrina merupakan salah satu aktivis yang tinggal dan berkegiatan di Buntu II Pancoran. Ia adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta dengan jurusan yang ia tekuni ialah ilmu hukum. Awalnya peneliti bertemu dengan Vebrina pada saat peneliti berkunjung ke Buntu II untuk pertama kalinya. Setelah

bertanya-tanya mengenai siapa yang bisa peneliti ajak berbicara mengenai kejadian di Buntu II peneliti diarahkan untuk bertemu dengan Vebrina ini.

Wawancara pertama kali dilaksanakan di depan kontrakan Vebrina, di salah satu rumah bedeng yang dimiliki oleh Mami Santi. Ditengah-tengah wawancara dengan Vebrina tiba-tiba peneliti dihampiri oleh nenek-nenek, ia habis bertengkar dengan salah satu warga yang entah permasalahannya apa. Nenek-nenek tersebut kemudian peneliti ketahui bernama Mak Eni, asal Bandung dan sudah lama tinggal di Buntu II. Mak Eni adalah seorang pemulung yang sering berkeliling di sekitar Tebet-Pancoran dari pagi hingga sore hari. Vebrina kemudian mengarahkan peneliti untuk sekalian mewawancara Mak Eni. Mak Eni sendiri memiliki peran penting pada saat ‘perang’ antara warga dan Pertamina berlangsung. Kemudian Vebrina dan Mak Eni menyarankan saya untuk mewawancara Mami Santi.

Mami Santi adalah pemilik rumah bedeng sekaligus pengontrak lahan yang ia kontrakan kepada para pengontrak dimana para pengontrak itu mayoritas orang pendatang dari luar Jakarta. Mami Santi dijuluki warga Buntu II sebagai “panglima perangnya Buntu II” karena vokalnya dia terhadap masalah Buntu II. Bisa dibilang Mami Santi adalah motor penggerak ibu-ibu di Buntu II Pancoran. Meskipun informan-informan dalam penelitian ini merupakan atas saran dari beberapa orang, namun peneliti memang memiliki acuan kriteria informan mengikuti kriteria informan yang sudah diungkapkan oleh Spradley. Setelah sub-bab ini peneliti ungkapkan kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk peneliti tarik sebagai informan.

1.6.3 Pemilihan Informan

Selama proses pengambilan data berjalan, informan merupakan sumber data utama dalam penelitian etnografi karena basis utama pengumpulan datanya ialah wawancara. Pemilihan informan juga akan selalu berkembang, tergantung perkembangan (kebutuhan) dari penelitian tersebut (Ingold, 2013:4) seperti strategi dan pengembangan ide analitis dalam pengumpulan data (Gibbons,

Hammersley and Atkinson, 1986:38) dan karenanya kriteria pemilihan informan tidak selalu sama ketika di lapangan atau berbeda dari *research design*. Meski demikian, peneliti tetap memerlukan dan merumuskan kriteria informan dalam *research design* ini sebagai bentuk *plan* atau rencana pada saat di lapangan. Berikut ialah kriteria informan dalam penelitian menurut Spradley (1997):

1. Enkulturasasi penuh: kegiatan untuk memberikan suatu pemahaman secara penuh, oleh karena itu informan haruslah orang yang mengerti langsung apa yang terjadi di lapangan terkait masalah yang diangkat.
2. Terlibat langsung: informan memiliki pengalaman penuh atas budaya atau topik yang diteliti. Dalam arti lain, informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam topik-topik yang akan dibicarakan nanti sehingga informan dapat membagikan pengalamannya.
3. Suasana budaya yang asing: peneliti menjadi kertas putih kosong yang terbuka atas informasi yang berasal dari informan dan mempertahankan sikap skeptis atas informasi yang diterima.
4. Memiliki ketersediaan waktu yang cukup: dalam proses wawancara dibutuhkan waktu yang cukup lama, terkadang memerlukan beberapa kali pertemuan. Oleh karenanya informan dan peneliti perlu memiliki kesepakatan terkait penentuan waktu dan tempat wawancara sehingga antara peneliti dan informan tidak saling merugikan baik aktivitas dan keperluan lainnya.
5. Non analitik: informan memberikan deskripsi jawaban sesuai pengetahuan dan pengalaman empiris yang mereka alami dengan menggunakan bahasa sehari-harinya tanpa menganalisis mengenai arti dari kondisi dan kejadian tersebut.

Adapun kriteria informan yang peneliti rumuskan sebagai rencana dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan merupakan warga Gang Buntu II, Pancoran; merupakan anggota/bagian dari kelompok solidaritas di Buntu II ; merupakan kelompok/individu yang pernah berkegiatan di Buntu II
2. Informan tinggal di Gang Buntu II setidaknya di akhir-akhir tahun 2020 dimana konflik dengan Pertamina mulai muncul ke permukaan sehingga informan menyaksikan dan merasakan pengalaman pada saat itu. Apabila informan merupakan anggota dari kelompok solidaritas maka informan minimal telah ikut serta dalam kegiatan kelompok tersebut sejak bulan Februari 2021 (mulai ‘panasnya’ isu Buntu II).
3. Informan paham betul mengenai salah satu tema seperti sejarah Buntu II, kronologi kejadian pengusuran di Gang Buntu II, kehidupan keseharian para warga, dan konflik-konflik yang pernah terjadi baik antar warga atau dengan pihak lainnya. Pengetahuan secara luas mengenai Buntu II dan warganya dilihat dari ada atau tidaknya informan pada saat konflik-konflik terjadi.
4. Informan setuju dan memiliki ketersediaan waktu untuk diwawancarai.

1.6.4 Analisis Data

Dalam studi etnografi, analisis data dilakukan dengan aspek-aspek seperti deskripsi, analisis, dan interpretasi data dengan melibatkan beberapa bentuk penerjemahan data seperti tabel, diagram, dan model-model (Creswell, 2007:162). Sedangkan Spradley menekankan pada pembangunan model-model taxonomi, tabel komparasi, dan tabel semantik untuk dapat menyelam ke dalam *way of life* masyarakat yang diteliti (Spradley, 1997). Meski demikian, analisis data dalam etnografi yang cukup populer ialah dengan seperti apa yang dinyatakan oleh Creswell:

“Other forms of analysis consist of comparing the cultural group to others, evaluating the group in terms of standards, and drawing connections between the culture-sharing group and larger theoretical frameworks. Other analysis steps include critiquing the research process and proposing a redesign for the study. Making an ethnographic interpretation of the culture-sharing group is a data transformation step as well.” (Creswell, 2007:162)

“Bentuk analisis lainnya terdiri dari membandingkan kelompok budaya dengan yang lain, mengevaluasi kelompok dalam hal standar, dan menarik hubungan antara kelompok berbagi budaya dan kerangka teoretis yang lebih besar. Langkah-langkah analisis lainnya termasuk mengkritik proses penelitian dan mengusulkan desain ulang untuk penelitian. Membuat interpretasi etnografi kelompok berbagi budaya juga merupakan langkah transformasi data.” (Creswell, 2007:162)

Jadi dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan etnografi, analisis data yang sering kali digunakan seperti membangun komparasi, evaluasi, dan menggambar koneksi-koneksi antar data di lapangan dengan teoritis. Selain itu dengan mengkritik kembali dan menulis rancangan penelitian selanjutnya, juga bagian dari analisis dalam pendekatan etnografi. Karenanya data-data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan beberapa tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dipilah-pilah. Peneliti mengumpulkan data wawancara dan observasi untuk kemudian peneliti kodifikasikan data-data sesuai tema-tema pembahasan. Data studi pustaka peneliti masukan ke dalam *matrix evidence* untuk memudahkan peneliti memilah data dan menginterpretasi hasil bacaan.

Kemudian setelah direduksi data akan disajikan dimana data akan diinterpretasikan dan dianalisis dalam bentuk narasi deskriptif serta dikaitkan dengan teori yang digunakan. Tahap final dari metode ini ialah dengan menarik kesimpulan dari data yang sudah diolah tadi. Data-data yang diperoleh selama di lapangan kemudian dicari koneksinya dengan pandangan etik sambil memperhatikan jarak peneliti dengan yang diteliti agar tidak bias dan memberikan justifikasi terhadap apa yang dilihat. Meski begitu peneliti kemudian menginterpretasikan data yang dibantu oleh potret kejadian-kejadian (data) yang memiliki koneksi dengan pandangan etik dan etik.

1.6.5 Etika Penelitian

Pada saat merancang penelitian, peneliti perlu untuk mempertimbangkan bahwa sebesar apa potensi yang akan ditimbulkan pada saat tulisan penelitian

sudah terungkap dan menjadi konsumsi publik. Terlebih isu-isu yang dibahas merupakan isu yang sensitif. Karena itu biasanya dalam penelitian kualitatif dibutuhkan sebuah etika yang mempertimbangkan dampak yang bisa merugikan peneliti ataupun partisipan. Creswell (2007:123) menjabarkan sebuah bentuk *concent* atau persetujuan antara peneliti dengan informan seperti (1) memperjelas hak informan untuk dapat menarik diri kapan saja secara sukarela; (2) menyatakan tujuan utama beserta prosedur penelitian; (3) pernyataan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; (4) menyatakan resiko terkait dengan penelitian; (5) manfaat apa yang akan didapat; (6) dan memerlukan tanda tangan informan sebagai bentuk akhir dari persetujuan antar kedua pihak. Terkhusus dalam antropologi etika penelitian ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab dan menghormati seluruh pertimbangan kesejahteraan serta hak manusia. Patricia A. Marshall (1992) menyampaikan prinsip etika penelitian dalam antropologi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan yang diinformasikan: dalam rangka menghormati informan, penyampaian informasi tentang penelitian untuk pemahaman mereka terhadap penelitian dan partisipasi sukarela penting dilakukan.
2. Perlindungan terhadap kerahasiaan: informan memiliki kontrol atas informasi dan komunikasi terhadap diri mereka sendiri. Karena adanya keterbatasan akses dalam informasi pribadi diperlukan persetujuan. Isu-isu yang sensitif memerlukan persetujuan seperti ini karena dampak yang bisa dirasakan oleh informan adalah ancaman terhadap kondisi emosional, fisik, dan ekonomi mereka.
3. Pertimbangan keuntungan dan kerugian: peneliti perlu mempertimbangan mengenai potensi keuntungan dan kerugian apa yang akan diterima oleh informan.

Peneliti untuk itu sebelum melakukan proses wawancara kepada informan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang kemudian menjelaskan tujuan peneliti di sini. Setelah itu peneliti menanyakan kesediaan informan untuk melakukan wawancara dan melakukan perekaman suara sebagai bentuk inventoris

data. Peneliti menyatakan bahwa peneliti melindungi identitas informan, namun beberapa informan seperti Vebrina dan Mak Eni tidak keberatan untuk menggunakan identitas mereka yang asli. Beberapa informan ada yang meminta namanya disamarkan dan tidak di foto, sekalipun ada foto ia meminta untuk disensor pada bagian wajah.